



Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan) di SMP Negeri 2 Karanglewas

Purwi Istiyarini^{1✉}, Muhammad Hanif²

^{1,2}Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Email: *purwirini@gmail.co.id

ABSTRACT

Quality education is not only determined by human resources, but also determined by the financing of education itself. Financing education is not only the responsibility of the government but the responsibility of all parties, including the government, parents and society. If education funding only comes from one party, then the education that takes place is not optimal. Because quality education requires high costs. In the context of an institution or organization, schools annually prepare a School Revenue and Expenditure Budget (RAPBS) which shows how to plan income and use costs for school operational needs. The use of these costs illustrates the pattern of financing in education. Thus, at all levels of education implementation, financing is very important to help ensure the implementation of education. Education will not occur without costs. The method in this research is qualitative with a descriptive approach. Based on the presentation of research on educational financing management in improving the quality of educational institutions at SMP Negeri 2 Karanglewas, it can be concluded that financing management is a process of optimizing existing funding sources, allocating available funds and distributing them as facilities or means to support the learning process so as to create a learning process that is effective and efficient. To achieve good school quality, education costs must be managed optimally. Therefore, the stages in education financing management need to be considered. Using effective funds for each educational institution, SMP Negeri 2 Karanglewas should establish a plan that is a comprehensive priority for education financing.

KEYWORDS: *Financing Management; Education; Draft; Implications*

ABSTRAK

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya di tentukan oleh sumber daya manusia saja, melainkan juga di tentukan oleh pembiayaan pendidikan itu sendiri. Pembiayaan pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah semata melainkan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, orangtua dan masyarakat. Jika pembiayaan pendidikan hanya berasal dari salah satu pihak saja maka pendidikan yang berlangsung tidak optimal. Karena pendidikan yang berkualitas membutuhkan biaya yang tinggi. Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk kebutuhan operasional sekolah. Penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan pemaparan pada penelitian manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan di SMP Negeri 2 Karanglewas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau

sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Penggunaan dana efektif setiap lembaga pendidikan, SMP Negeri 2 Karanglewas seharusnya menetapkan rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif.

KATA KUNCI: Manajemen Pembiayaan; Pendidikan; Konsep; Implikasi

PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh sumber daya manusia saja, melainkan juga ditentukan oleh pembiayaan pendidikan itu sendiri. Pembiayaan pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah semata melainkan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, orangtua dan masyarakat. Jika pembiayaan pendidikan hanya berasal dari salah satu pihak saja maka pendidikan yang berlangsung tidak optimal. Karena pendidikan yang berkualitas membutuhkan biaya yang tinggi (Ansori, 2020).

Dalam prosesnya hampir dapat dipastikan bahwa pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen pembiayaan Pendidikan (Sunhaji et al., 2021). Kebutuhan tersebut dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang juga meliputi bidang pendidikan (Fufindo, 2013).

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini (Atuti & Dania, 2019).

Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu biaya produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya ini. J. Hallack mengemukakan tiga macam kesulitan, yaitu berkenaan dengan a) definisi produksi pendidikan, b) identifikasi transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan, dan c) suatu kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai pelayanan umum (Arifudin et al., 2021).

Pembiayaan atau pendanaan dalam sebuah pendidikan adalah sebuah elemen penting bagi terselenggaranya proses belajar mengajar, pembiayaan dalam pendidikan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pendidikan yang dilaksanakan. Pembiayaan diperlukan untuk pengadaan alat-alat, gaji guru, pegawai, dan aktivitas dan kegiatan dalam institusi (Soned et al., 2017). Selain itu pembiayaan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari menganalisis biaya pendidikan yaitu untuk memberikan kemudahan, memberikan informasi pada para pengambil keputusan untuk menentukan langkah/cara dalam pembuatan kebijakan sekolah, guna mencapai efektivitas maupun efisiensi pengolahan dana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, analisis manfaat biaya pendidikan bagi pemerintah menjadi acuan untuk menetapkan anggaran pendidikan dalam RAPBN, dan juga sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan bagi masyarakat, analisis manfaat biaya pendidikan ini berguna sebagai dasar atau pijakan dalam melakukan "investasi" di dunia pendidikan. Hal ini dirasakan penting untuk diketahui dan dipelajari, karena menurut sebagian masyarakat pendidikan hanya menghabiskan uang tanpa ada jaminan/prospek peningkatan hidup yang jelas dimasa yang akan datang (Mesiono et al., 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Handayani & Huda,

2020).

Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas.

Pada umumnya, pendidikan diakui sebagai suatu investasi sumber daya manusia. Nilai ekonomi pendidikan dapat dilihat dari sumbangan asas manfaat terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas. Bagi masyarakat, pendidikan bermanfaat untuk memperkaya kehidupan ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Salah satu aspek penting untuk memajukan pendidikan adalah aspek pembiayaan pendidikan (Nafisah & Widiyanto, 2017).

Penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) yang dianggap penting dalam konteks adalah masalah tentang pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur yang mutlak harus tersedia. Sebagai contoh pemerintah Republik Indonesia menurut amanat Undang-Undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dernikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah (Azhari & Kurniady, 2016).

Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk kebutuhan operasional sekolah. Penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya (Azhari & Kurniady, 2016).

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya- biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia (Winarsih, 2016).

Karena manfaatnya yang begitu luas dan meresap ke berbagai bidang, maka pembiayaan pendidikan seyogyanya harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Mengacu pada konsep di atas, maka masalah pembiayaan menjadi sangat strategis untuk dikaji. Masalah pembiayaan pendidikan merupakan masalah utama dalam menjalankan roda pendidikan. Pengelolaan yang baik dalam pembiayaan pendidikan akan berdampak pada mutu pendidikan.

Ini yang menjadi isu utama dalam dunia pendidikan. Isu utama ekonomi pendidikan menurut Elchanan Cohn adalah bagaimana mengidentifikasi dan melakukan pengukuran terhadap nilai ekonomi untuk pendidikan, alokasi sumber-sumber dalam pendidikan, gaji tenaga pendidik, biaya pendidikan dan perencanaan pendidikan (Arwildayanto et al., 2017).

Upaya dalam mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang di terapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah mencapai visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas terkait manajemen pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 2 Karanglewas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif. Penelitian yang mengandalkan wawancara, kelompok fokus, dan analisis dokumen untuk menarik kesimpulan tentang orang dan hal yang diteliti disebut penelitian kualitatif (Zakariah et al., 2020). Metode kualitatif deskriptif sering digunakan dalam penelitian. Ekologi deskriptif adalah metode kajian yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena dan kejadian lingkungan, baik yang alami maupun antropogenik. (Anggito & Setiawan, 2018).

Kami mewawancarai Setiyowati, S.Pd. (Kepala SMP Negeri 2 Karanglewas), Sri Hartanto (Wakil Kepala SMP Negeri 2 Karanglewas), dan Eni Purwaningsih, A.Md. (Kepala Tata Usaha SMP Negeri 2 Karanglewas) dan melakukan observasi di SMP Negeri 2 Karanglewas untuk melengkapi data kami. Sedangkan buku, tesis, jurnal, dan karya tulis lainnya dengan topik manajemen pembiayaan pendidikan menjadi sumber data sekunder untuk penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Implikasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu relatif singkat. Oleh karena itu uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat maupun orang tua untuk membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Biaya yang dikeluarkan di bidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada periode tertentu, pada masa yang akan datang harus menghasilkan keuntungan atau manfaat (benefit) baik dalam bentuk financial maupun nonfinansial. Untuk meningkatkan benefit pendidikan secara optimal, maka para pengelola pendidikan tentunya perlu mewujudkan efisiensi dalam investasi pendidikan (Arwildayanto et al., 2017).

Pembiayaan yang dikaitkan dengan usaha pendidikan akan memberikan sumbangan positif bagi pencapaian tujuan pendidikan. Senada dengan itu Thoung (mengatakan bahwa biaya, "*That shich must be given up in order to gain something else*". Kemudian Bowen mengatakan biaya digunakan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana seperti tenaga kerja, modal, tanah, operasional pengajaran, pelayanan administratif dan beasiswa. Biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan yang diberikan untuk setiap kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Konsep biaya tidak selalu identik dengan uang. Namun demikian untuk memberikan penilaian yang tepat maka besarnya pengorbanan tersebut pada akhirnya harus dapat dihargai dengan sejumlah uang. Achmad Sanusi yang dikutip oleh Mulyono secara konseptual merumuskan biaya pendidikan sebagai pengorbanan yang tak dapat dihindarkan untuk mendukung proses kegiatan yang diturunkan dari rencana kerja dan anggaran, atau sejalan dengan yang dibutuhkan sepanjang pelaksanaan rencana dan anggaran itu, serta pengorbanan tersebut dapat dihitung atau diperkirakan dalam uang, berdasarkan harga satuan di pasar atau ketentuan lain yang disahkan (Sudarmono et al., 2020).

Pembiayaan dalam bidang pendidikan mempunyai kesamaan dengan bidang lain dalam konsepnya, dimana lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh lulusan. Dengan demikian kegiatan pendidikan dapat dipandang sebagai services terhadap siswa atau peserta didik selama belajar.

Biaya dalam pengeluaran untuk pendidikan bukan merupakan suatu konsumsi, tetapi dianggap sebagai suatu investasi *human capital*. Investasi ini ditanamkan dalam pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan untuk menaikkan produktivitas tenaga kerja. Karena merupakan investasi, tentunya diharapkan setelah selesai proses pendidikan investasi tersebut menghasilkan manfaat ekonomi (*economic benefits*) bagi individu dan masyarakat yang melakukannya. Walaupun diakui bahwa *economic gains* bukan merupakan satu-satunya manfaat dari investasi pendidikan, karena disamping manfaat ekonomi juga ada manfaat lainnya seperti manfaat sosial, kultural, dan politik (Nurhayati et al., 2022).

Dalam pengukuran manfaat ekonomi pendidikan memberikan indikasi sejauh mana sumbangan investasi pendidikan terhadap perekonomian dan sebagai alat untuk membandingkan pendidikan investasi di sektor lainnya. Tujuan dari investasi pendidikan yaitu untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, beberapa studi menunjukkan hubungan erat antara pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula produktivitasnya. Pendidikan memberikan pengetahuan dan keahlian

kepada seseorang hingga memungkinkan menjadi tenaga kerja yang terlatih dan terampil yang diperlukan dalam meningkatkan sektor perekonomian (Nurhayati et al., 2022).

Pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam human capital. Beberapa penelitian yang telah dilakukan telah menunjukkan bahwa pendidikan mampu meningkatkan pendapatan seseorang, walaupun setelah dikurangi dengan biaya pendidikan langsung dan biaya tidak langsung dan setelah disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan terhebat dari sekian banyak orang terdidik. Bukti yang sama yang didapat dari ratusan negara yang memiliki sistem budaya dan ekonomi yang berbeda, walaupun angkanya lebih besar di negara-negara yang berkembang.

Menurut Morphet memandang bahwa pendidikan merupakan investasi dalam manusia. Sebagai suatu investasi pendidikan harus dilakukan secara rasional karena itu diperlukan biaya yang besar. Dengan adanya investasi dalam pendidikan memungkinkan diperolehnya sejumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan. Selanjutnya Jones menyatakan bahwa tinjauan dan peranan pendidikan dari sudut pandang ekonomi mendorong lahirnya suatu pemikiran tentang konsep human capital. Dalam konsep tersebut menekankan pentingnya masyarakat untuk memiliki keterampilan, kebiasaan (sikap) dan pengetahuan (Mulyani & Mulyadi, 2018).

Setidaknya ada dua hal yang ikut mendukung konsep biaya bagi pendidikan. Pertama, dasar filosofi pendidikan memiliki fungsi untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan agar nantinya manusia menjadi peserta didik itu dapat mandiri. Pendidikan memiliki potensi kekuatan untuk mengembangkan manusia. Oleh karena itu maka pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai interest public invesment. Kedua, misi dan tujuan pendidikan senantiasa diarahkan pada terwujudnya sumber daya manusia yang akan mampu mengerjakan pembangunan nasional. Operasionalisasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan perlu memperhatikan produktivitas pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

Manajemen Pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus manajemen pembiayaan pendidikan pada bagaimana sumber dana yang ada mampu dikelola secara profesional sehingga memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Dalam definisi ini ada tiga kata kunci dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu optimalisasi sumber dana, alokasi dan distribusi. Tiga kata kunci inilah yang pada akhirnya menjadi fungsi dari pembiayaan pendidikan itu sendiri. 1) Optimalisasi sumber dana Fungsi manajemen pembiayaan adalah bagaimana lembaga pendidikan mampu mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang diperoleh. 2) Alokasi Alokasi dalam manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses *financial decision*. Di sinilah kebijakan alokasi pembiayaan pendidikan ditentukan. Kebijakan dalam menentukan alokasi ini harus mengedepankan program prioritas dalam sebuah proses pendidikan. 3) Distribusi Distribusi merupakan proses penyaluran dana sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan (Winarsih, 2016).

Dalam fungsi manajemen pembiayaan pendidikan, dikatakan bahwa dana (biaya) memainkan peran penting dalam pendidikan pada tiga area; pertama, ekonomi pendidikan dalam kaitannya dengan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan; kedua, keuangan sekolah kaitannya dengan kebijakan sekolah untuk menerjemahkan uang terhadap layanan kepada peserta didik dan ketiga, pajak administrasi bisnis sekolah yang harus diorganisir secara langsung berkaitan dengan tujuan kebijakan. Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungking tak terhitung.

Untuk menjalankan fungsi manajemen pembiayaan secara efektif, maka kita harus memerhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengelolaannya. Diantara prinsip manajemen pembiayaan pendidikan adalah: 1) Akuntabilitas (accountability) 2) Transparan 3) Integritas 4) Konsistensi 5) Efektif dan efisien.

Dalam ruang Lingkup Pembiayaan Pendidikan bahwa penganggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu

dalam menentukan biaya satuan pendidikan terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid (Usman, 2016).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran biaya pendidikan adalah: a) Anggaran belanja sekolah harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan b) Merevisi peraturan dan input lain yang relevan, dengan mengembangkan perencanaan sistem yang efektif c) Memonitor dan menilai keluaran pendidikan secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya.

Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan sekolah, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi pengembangan administratif. Dalam hubungan ini adalah penyusunan RKAM memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan ekstern yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Pelaksanaan (Accounting) adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaan keuangan sekolah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoretis maupun peraturan pemerintah.

Kemudian perlu dilakukan evaluasi (Auditing) adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam evaluasi keuangan sekolah, pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan berbasis sekolah (Handayani & Huda, 2020).

Pada prinsipnya sumber pembiayaan pendidikan bisa diperoleh dari berbagai sumber selama sumber itu diperoleh secara halal dan bisa dipertanggungjawabkan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun peserta didik itu sendiri.

Sedangkan biaya tidak langsung adalah berupa keuntungan yang hilang yang dikorbankan peserta didik selama belajar. Alokasi dana ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi pengeluaran operasional atau pendapatan dan pengeluaran modal. Pengeluaran operasional merupakan semua pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan yang mendukung proses kegiatan mengajar seperti gaji kepala sekolah, gaji guru tetap maupun gaji guru tidak tetap, penyusunan aktiva tetap, biaya listrik dan telepon. Sedangkan pengeluaran modal merupakan semua pengeluaran modal merupakan semua pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai barang modal seperti membeli tanah, membangun gedung dan membeli peralatan sekolah.

Biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik yang berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan peserta didik selama belajar.

Pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses di mana pendapatan dan sumber dana tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah/madrasah. Pendapatan atau sumber dana pendidikan diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat atau orang tua. Menurut Levin dalam Akdon, pembiayaan sekolah adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah

geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Jadi pembiayaan pendidikan adalah aktivitas mengelola pendanaan pendidikan yang berwujud uang dan barang untuk membiayai program kegiatan pendidikan yang telah ditetapkan. Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah/madrasah akan memengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan dan digunakan sebesar besarnya untuk mencerdaskan peserta didik dan peningkatan mutu. Pembiayaan merupakan hal penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, dan pemerintah memiliki peran yang besar di dalamnya (Nurhayati et al., 2022).

Pendidikan dalam operasionalnya tidak terlepas dari pembiayaan atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang relatif singkat, oleh karena itu uang yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat, maupun orang tua, untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya dipandang sebagai investasi, yang di masa mendatang akan menghasilkan keuntungan atau manfaat dalam bentuk finansial dan non finansial.

Dukungan finansial yang cukup akan mempermudah proses manajerial suatu lembaga pendidikan untuk berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpin. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah/madrasah bersama komponen-komponen lainnya. Pembiayaan pendidikan sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat untuk turut andil dan merasa memiliki lembaga tersebut, oleh karenanya jika madrasah/lembaga ingin mendapatkan dana dari partisipasi masyarakat maka madrasah/lembaga harus memiliki program yang bagus. Kepercayaan memang dapat membangunkan kesadaran seseorang untuk memberikan bantuan dana.

Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 2 Karanglewas

Berbagai pemikiran tentang kualitas pendidikan dapat kita temukan dalam berbagai jenis sesuai dengan sudut pandangnya para ahli. Beeby melihat kualitas pendidikan dari tiga perspektif yaitu perspektif ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Berdasarkan perspektif ekonomi, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mempunyai kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lulusan pendidikan secara langsung dapat memenuhi angkatan kerja di dalam berbagai sektor ekonomi. Dengan bekerjanya mereka, pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi. Menurut pandangan sosiologi, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bermanfaat terhadap seluruh masyarakat dilihat dari berbagai kebutuhan masyarakat, seperti mobilitas sosial, perkembangan budaya, pertumbuhan kesejahteraan dan pembebasan kebodohan. Sedangkan menurut perspektif pendidikan melihat mutu pendidikan dari sisi pengayaan dari proses belajar mengajar dan dari segi kemampuan lulusan dalam hal memecahkan masalah dan berfikir kritis (Winarsih, 2016).

Menurut Beeby, kualitas dalam pendidikan harus mengkaji makna esensi yang amat mendasar yang memberikan ciri tertentu terhadap pendidikan yang berkualitas yang berbeda dari pendidikan yang tidak berkualitas. Untuk sampai kepada konsep ini maka kualitas dapat dikaji baik dari segi proses dan segi produk maupun dari sisi internal dan sisi fitness atau kesesuaian. Kualitas dari segi proses mengandung arti efektivitas atau ketepatan dan efisiensi keseluruhan faktor-faktor atau unsur-unsur yang berperan dalam proses pendidikan. Misalkan sekolah yang berada di daerah kumuh dan sekolah yang beroperasi di daerah elit; walaupun menerima calon siswa yang sama, karena kualifikasi guru yang berbeda, kelengkapan sarana prasarana yang tidak sama, suasana belajar yang berbeda pengelolaan tingkat efisiensi yang berbeda, maka proses pendidikan di daerah elit akan jauh lebih baik dibandingkan dengan proses pendidikan di daerah kumuh. Secara kualitatif proses pendidikan di daerah elit akan lebih tinggi karena faktor ketepatan, kelengkapan dan efisiensi pengelolaan yang lebih sempurna. Keunggulan dalam proses pendidikan dengan sendirinya akan menghasilkan produk yang berbeda. Dengan demikian mutu proses akan menghasilkan mutu lulusan yang berbeda (Munir, 2013).

Secara internal efisiensi, pendidikan di SMP Negeri 2 Karanglewas yang berkualitas adalah bilamana tujuan-tujuan kelembagaan dan kurikuler yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Sedangkan mutu pendidikan dalam pengertian kesesuaian adalah bilamana lulusan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan ketenagaan di pasaran kerja, baik di industri

maupun di sektor-sektor lainnya. Bisa juga mutu pendidikan itu dapat dilihat dari sisi proses dan lulusan yang dihasilkannya. Pendidikan yang bermutu dari sisi proses diukur dari ketepatan, kelengkapan dan efisiensi pengelolaan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pendidikan. Sedangkan mutu pendidikan di lihat dari sisi produk yakni lulusan yang dihasilkan, dapat diukur dari tingkat ketercapaian tujuan-tujuan kelembagaan dan kurikuler yang telah ditetapkan dan atau kesesuaian lulusan yang dihasilkannya dengan kebutuhan masyarakat terutama dunia kerja.

Oleh berbagai lembaga yang menerapkan *total quality management* mendefinisikan kualitas sebagai memenuhi persyaratan yang dituntut konsumen. Pandangan ini didasarkan oleh alasan bahwa penilaian akhir dari kualitas adalah konsumen dan tanpa mereka lembaga tidak ada. Oleh karena itu lembaga harus menggunakan berbagai cara untuk menyelidiki atau mempelajari persyaratan-persyaratan konsumen, kemudian menerjemahkannya ke dalam produk baru yang inovatif. Lebih lanjut Sallis mengelompokkan konsumen pendidikan ke dalam dua kelompok yaitu Pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal meliputi para pendidik dan staf pendukung. Sedangkan pelanggan eksternal meliputi pelanggan eksternal utama yaitu peserta didik; pelanggan eksternal sekunder yaitu orang tua dan pelanggan eksternal tertier yaitu pasaran kerja, pemerintah dan masyarakat.

Dari beberapa pendapat tentang kualitas pendidikan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas itu merupakan derajat sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan evaluasi atau penilaian para penghasil dan atau pihak pemakai. Agar derajat kualitas sesuatu itu dapat ditetapkan, maka atribut- atribut sesuatu beserta standar atau kriteria-kriteria kebermutuannya terlebih dahulu harus ditetapkan. Kualitas/mutu pendidikan itu bersifat multifacet atau multi dimensi yang meliputi input, proses dan out put.

Manajemen Pembiayaan di SMP Negeri 2 Karanglewas merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus manajemen pembiayaan pendidikan pada bagaimana sumber dana yang ada mampu dikelola secara profesional sehingga memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Dalam fungsi manajemen pembiayaan pendidikan, dikatakan bahwa dana (biaya) memainkan peran penting dalam pendidikan pada tiga area; pertama, ekonomi pendidikan dalam kaitannya dengan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan; kedua, keuangan sekolah kaitannya dengan kebijakan sekolah untuk menerjemahkan uang terhadap layanan kepada peserta didik dan ketiga, pajak administrasi bisnis sekolah yang harus diorganisir secara langsung berkaitan dengan tujuan kebijakan. Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungkin tak terhitung.

Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan SMP Negeri 2 Karanglewas, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi pengembangan administratif. Dalam hubungan ini adalah penyusunan RKAM memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan ekstern yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Pelaksanaan (Accounting) adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi.

Dalam pelaksanaan keuangan SMP Negeri 2 Karanglewas dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoretis maupun peraturan pemerintah.

Kemudian perlu dilakukan evaluasi (Auditing) adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam evaluasi keuangan sekolah, pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan berbasis sekolah

Pada prinsipnya sumber pembiayaan pendidikan bisa diperoleh dari berbagai sumber selama sumber itu diperoleh secara halal dan bisa dipertanggungjawabkan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun peserta didik itu sendiri.

Sedangkan biaya tidak langsung adalah berupa keuntungan yang hilang yang dikorbankan peserta didik selama belajar. Alokasi dana SMP Negeri 2 Karanglewas ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi pengeluaran operasional atau pendapatan dan pengeluaran modal. Pengeluaran operasional merupakan semua pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan yang mendukung proses kegiatan mengajar seperti gaji kepala sekolah, gaji guru tetap maupun gaji guru tidak tetap, penyusunan aktiva tetap, biaya listrik dan telepon. Sedangkan pengeluaran modal merupakan semua pengeluaran modal merupakan semua pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai barang modal seperti membeli tanah, membangun gedung dan membeli peralatan sekolah.

Biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik yang berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan peserta didik selama belajar.

Pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses di mana pendapatan dan sumber dana tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah/madrasah. Pendapatan atau sumber dana pendidikan diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat atau orang tua. Menurut Levin dalam Akdon, pembiayaan sekolah adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Jadi pembiayaan pendidikan adalah aktivitas mengelola pendanaan pendidikan yang berwujud uang dan barang untuk membiayai program kegiatan pendidikan yang telah ditetapkan. Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah/madrasah akan memengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan dan digunakan sebesar besarnya untuk mencerdaskan peserta didik dan peningkatan mutu. Pembiayaan merupakan hal penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, dan pemerintah memiliki peran yang besar di dalamnya.

Pendidikan dalam operasionalnya tidak terlepas dari pembiayaan atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang relatif singkat, oleh karena itu uang yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat, maupun orang tua, untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya dipandang sebagai investasi, yang di masa mendatang akan menghasilkan keuntungan atau manfaat dalam bentuk finansial dan nonfinansial (Arifudin et al., 2021).

Dukungan finansial yang cukup akan mempermudah proses manajerial suatu lembaga pendidikan untuk berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpin. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah/madrasah bersama komponen-komponen lainnya. Pembiayaan pendidikan sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat untuk turut andil dan merasa memiliki lembaga tersebut, oleh karenanya jika madrasah/lembaga ingin mendapatkan dana dari partisipasi masyarakat maka madrasah/lembaga harus memiliki program yang bagus. Kepercayaan memang dapat membangunkan kesadaran seseorang untuk memberikan bantuan dana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada penelitian manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan di SMP Negeri 2 Karanglewas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau

sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Penggunaan dana efektif setiap lembaga pendidikan, SMP Negeri 2 Karanglewas seharusnya menetapkan rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Ansori, M. (2020). Pengembangan Kurikulum Madrasah Di Pesantren. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.32>
- Arifudin, O., Sonia, N. R., Darmawan, I. P. A., R, J. S. A. A., Abbas, D. S., Saputro, A. N. C., Poltak, H., Sundulusi, C., Darmawati, Harahap, E., Sijabat, D., Rahayu, H. A., & Hasbi, R. I. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Arwildayanto, Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Widya Padjajaran.
- Atuti, & Danial. (2019). Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Membangun Budaya Madrasah Yang Kondusif di Madrasah Aliyah Negeri. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare/article/view/3495>
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(2). <https://doi.org/10.17509/jap.v23i2.5631>
- Fufindo, O. G. (2013). Pembinaan Kesiswaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 1(1). <https://doi.org/10.24036/bmp.v1i1.2724>
- Handayani, N. F., & Huda, N. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Pascadesentralisasi Pendidikan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(4). <https://doi.org/10.17977/um027v3i42020p332>
- Mesiono, Suswanto, Lubis, R. R., & Haidir. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i1.6244>
- Mulyani, H., & Mulyadi, A. (2018). Model Sistem Informasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bandung. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1). <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i1.15829>
- Munir, A. (2013). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *At-Ta'dib*, 8(2). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>
- Nafisah, D., & Widiyanto. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah. *Economic Education Analysis Journal*, 6(3). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/20316>
- Nurhayati, Nasir, M., Mukti, A., Safri, A., Hasibuan, L., & Anwar, K. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 594–601.
- Sonedi, Jamalie, Z., & Majeri. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat. *Fenomena*, 9(1), 25–46. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.702>
- Sudarmono, Hasibuan, L., & Us, K. A. (2020). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>
- Sunhaji, Roqib, M., & Nurfuadi. (2021). Social Humanism of Madrasah: A Reflection of Indonesian Muslim Intellectuals Establishment. *Didaktika Religia*, 9(2), 227.
- Usman, J. (2016). Urgensi Manajemen Pembiayaan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.19105/tjpi.v11i2.1170>
- Winarsih, S. (2016). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah. *Proceedings of International Conference on Economics, Education and Cultural Development of Moslem Society in ASEAN*.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research and Development (R and D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah.